

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KELURAHAN

Riduan Siagian¹, Jumadiyah Wardati², Monang Tumangger³
Universitas Efarina, Indonesia^{1,2,3}
Email: riduansiagian.ipwija@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan kelurahan. Tanpa pengendalian yang memadai, pengelolaan keuangan berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan, pengeluaran tanpa otorisasi, bukti transaksi tidak lengkap, duplikasi pembayaran, keterlambatan pelaporan, hingga rendahnya transparansi kepada masyarakat. Penelitian bertujuan menerapkan SPI melalui penyusunan SOP dan kontrol kunci, pemetaan proses serta titik rawan (risk points), penyediaan template administrasi yang sederhana, pelatihan perangkat kelurahan, dan pembangunan mekanisme monitoring/pelaporan (termasuk dashboard ringkas). Kerangka SPI mengacu pada praktik umum (misalnya COSO) yang disesuaikan dengan konteks kelurahan, mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian (otorisasi, pemisahan tugas, kontrol dokumen, rekonsiliasi, pembatasan akses), informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Luaran yang diharapkan meliputi dokumen kebijakan SPI, template administrasi (register transaksi, checklist bukti, berita acara, format rekonsiliasi, log aset), serta dashboard realisasi dan kepatuhan dokumen. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi SPI dapat meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas keuangan, meskipun masih terdapat kendala yang perlu dikelola agar sistem tetap berkelanjutan.

Kata kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, SOP*

Abstract

This article discusses the implementation of an Internal Control System (SPI) to improve transparency and financial accountability in village/urban-ward administration (kelurahan) in Indonesia. Without adequate controls, financial management may lead to risks such as incorrect record-keeping, unauthorized expenditures, incomplete transaction evidence, duplicate payments, delayed reporting, and low public transparency. The research aims to implement SPI by developing standard operating procedures (SOP) and key controls, mapping financial processes and risk points, providing simple administrative templates, training kelurahan staff, and establishing monitoring and reporting mechanisms (including a concise dashboard). The SPI framework follows common practices (e.g., COSO) adapted to the kelurahan context, covering control environment, risk assessment, control activities (authorization, segregation of duties, document controls, reconciliation, and access restrictions), information and communication, and monitoring. The expected outputs include SPI policy documents, administrative templates (transaction registers, evidence checklists, minutes/record forms, reconciliation formats, and asset logs), as well as a dashboard for realization and document compliance. The findings indicate that implementing SPI can significantly improve financial compliance and accountability, though several challenges still need to be addressed to ensure the system's sustainability.

Keywords: *Internal Control System, Financial Transparency, Financial Accountability, SOP*

PENDAHULUAN

Keuangan kelurahan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan program pemberdayaan masyarakat karena seluruh kegiatannya bersumber dari anggaran publik. Pengelolaan anggaran tersebut menuntut ketertiban, ketepatan prosedur, serta kemampuan perangkat kelurahan dalam menjaga kualitas administrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Jika pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pelayanan dan penggunaan anggaran untuk kepentingan warga bisa tidak tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kelurahan, terutama pada aspek pengendalian internal. Tanpa pengendalian yang memadai, risiko yang mungkin muncul mencakup salah pencatatan, pengeluaran tanpa otorisasi yang seharusnya, bukti transaksi yang tidak lengkap, hingga potensi duplikasi pembayaran. Kondisi ini tidak hanya merugikan administrasi keuangan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas pertanggungjawaban yang diharapkan oleh pimpinan maupun masyarakat.

Selain itu, masalah berikutnya yang kerap terjadi adalah keterlambatan pelaporan dan lemahnya keterlacakan (*traceability*) dokumen pertanggungjawaban. Pada level operasional, proses pengajuan kegiatan, persetujuan biaya, pembayaran, penyusunan SPJ, dan penyusunan laporan realisasi sering kali belum memiliki pola kerja yang seragam. Akibatnya, dokumen pendukung tidak tersusun rapi, format administrasi bervariasi antar petugas, serta penelusuran data ketika dibutuhkan menjadi memakan waktu lebih lama.

Permasalahan tersebut juga berdampak langsung pada transparansi dan akuntabilitas keuangan kelurahan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, melainkan juga mencakup kejelasan nilai, periode, output kegiatan, serta dasar pelaksanaan yang dapat dipahami publik. Ketika pencatatan dan pelaporan kurang terkontrol, maka informasi yang disampaikan menjadi kurang konsisten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan kelurahan ikut menurun.

Lebih jauh, lemahnya sistem pengendalian internal dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan administrasi berulang, bahkan temuan saat pemeriksaan. Dalam konteks pengelolaan dana publik, kesalahan yang sekilas tampak administratif sebenarnya bisa berimplikasi pada ketidaksesuaian prosedur, lemahnya kepatuhan terhadap otorisasi, dan rendahnya kualitas laporan keuangan. Karena itu, pengendalian internal perlu diposisikan sebagai mekanisme pencegahan dan perbaikan yang sistematis, bukan sekadar respons setelah masalah muncul.

Oleh karena itu, diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang sederhana namun disiplin untuk menutup celah risiko pada setiap tahapan pengelolaan keuangan kelurahan. SPI yang baik berfungsi memastikan kegiatan sesuai aturan, laporan keuangan andal, aset/kas terlindungi, dan proses pertanggungjawaban berjalan tertib. Kerangka SPI dalam konteks kelurahan dapat dibangun melalui penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (*monitoring*) agar sistem berjalan konsisten.

Implementasi SPI juga perlu diterjemahkan ke dalam bentuk prosedur kerja yang jelas melalui SOP serta kontrol kunci seperti otorisasi, pemisahan tugas, kontrol dokumen, rekonsiliasi, dan pembatasan akses. Selain itu, kelengkapan administrasi seperti register transaksi, checklist bukti SPJ, format verifikasi dan otorisasi, hingga pengarsipan fisik maupun digital menjadi instrumen penting agar setiap pengeluaran dan pelaporan memiliki dasar yang dapat ditelusuri. Pembinaan melalui pelatihan dan simulasi kasus akan membantu petugas memahami cara menjalankan prosedur secara benar sesuai peran masing-masing. Pada akhirnya, latar belakang masalah ini bermuara pada kebutuhan kelurahan untuk memiliki mekanisme yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara nyata. Dengan SPI yang terstruktur, kelurahan dapat mengurangi risiko salah pencatatan dan pengeluaran tidak sah, mempercepat penyusunan serta penelusuran dokumen, dan membuat laporan realisasi lebih tepat waktu. Monitoring rutin dan evaluasi berbasis indikator kinerja juga diperlukan agar penerapan SPI tidak berhenti pada tahap pembuatan dokumen, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja dalam pengelolaan keuangan kelurahan.

LANDASAN TEORI

Kajian pustaka ini membahas keterkaitan antara Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada tingkat kelurahan. Keuangan kelurahan mencakup pengelolaan anggaran publik untuk pelayanan dan program pemberdayaan masyarakat, sehingga menuntut tata kelola yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa SPI yang memadai, proses pengelolaan dapat menimbulkan berbagai risiko administratif dan keuangan seperti salah pencatatan, pengeluaran tanpa otorisasi, kelengkapan bukti transaksi yang lemah, hingga keterlambatan pelaporan yang akhirnya mengurangi kepercayaan publik.

SPI dipahami sebagai seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kegiatan

sesuai aturan, laporan keuangan andal, serta aset/kas terlindungi. Dalam konteks pemerintahan kelurahan, SPI berperan penting karena seluruh tahapan pengelolaan—mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan transaksi, pencatatan dan pelaporan realisasi, sampai pengarsipan bukti pertanggungjawaban—melibatkan banyak pihak dan berpotensi menimbulkan celah. Karena itu, kajian pustaka menekankan bahwa pengendalian tidak hanya diperlukan saat transaksi terjadi, tetapi juga pada titik-titik kritis sepanjang siklus pengelolaan keuangan.

Kerangka teori SPI yang sering dijadikan rujukan adalah COSO, yang mengintegrasikan beberapa komponen pengendalian seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam kajian pada wilayah kelurahan, komponen-komponen tersebut perlu disesuaikan dengan karakter organisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Lingkungan pengendalian dapat dibangun melalui komitmen pimpinan, etika kerja, dan kejelasan pembagian peran. Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko utama pada transaksi dan pelaporan, terutama pada area berisiko tinggi seperti pengelolaan kas, pengadaan sederhana, serta penyusunan SPJ.

Aktivitas pengendalian dalam kajian pustaka umumnya diwujudkan melalui penerapan otorisasi, pemisahan tugas (*segregation of duties*), kontrol dokumen, rekonsiliasi, dan pembatasan akses. Dengan adanya pemisahan tugas, proses pengajuan, verifikasi, persetujuan, pembayaran, dan pemeriksaan tidak berjalan dalam satu alur tunggal yang berpotensi memunculkan penyalahgunaan atau kesalahan. Kontrol dokumen juga menjadi kunci karena kualitas pertanggungjawaban keuangan sangat ditentukan oleh kelengkapan bukti, penomoran dokumen yang memudahkan penelusuran, serta pengarsipan fisik maupun digital yang tertata. Kajian pustaka juga menekankan pentingnya rekonsiliasi berkala antara buku kas dan rekening untuk menjaga konsistensi data.

Lebih lanjut, kajian pustaka menyoroti bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dicapai melalui mekanisme internal, tetapi juga melalui informasi dan komunikasi yang rutin serta mudah dipahami. Oleh sebab itu, publikasi ringkas realisasi program dan ketersediaan kanal pengaduan perlu didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang terstandar. Peningkatan transparansi dapat dipandang sebagai dampak langsung dari perbaikan kualitas dokumen pertanggungjawaban dan konsistensi pelaporan. Dalam kerangka ini, dashboard pelaporan atau media rekam yang sederhana dapat membantu pengelola keuangan memantau kepatuhan dokumen sekaligus menyediakan ringkasan capaian kepada pihak terkait.

Terakhir, kajian pustaka menegaskan pentingnya pemantauan (*monitoring*) agar pengendalian internal berjalan konsisten dan berkelanjutan. *Monitoring* dapat dilakukan melalui *review* berkala, audit internal sederhana, serta tindak lanjut atas temuan. Kajian pustaka juga menyoroti bahwa keberhasilan implementasi SPI sangat dipengaruhi oleh faktor keterbatasan SDM, kebiasaan dokumentasi yang tidak seragam, dan risiko kepatuhan menurun saat volume kegiatan meningkat. Dengan demikian, pembentukan SOP yang ringkas, pelatihan dan simulasi penyusunan SPJ, penguatan template administrasi, serta penetapan indikator kinerja (misalnya ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan bukti SPJ, dan terlaksananya rekonsiliasi) menjadi pendekatan yang relevan untuk memastikan SPI tidak berhenti pada penyusunan dokumen, melainkan benar-benar diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan kelurahan.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini berfokus pada penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan kelurahan melalui langkah-langkah kerja yang terstruktur. Proses dimulai dengan *kick-off* dan pengumpulan dokumen, yaitu menghimpun SOP yang sudah ada, contoh dokumen SPJ, buku kas, laporan realisasi, serta daftar aset/inventaris kelurahan. Setelah itu dilakukan pemetaan proses (*as-is*) guna memahami alur kerja yang berjalan, misalnya alur pengajuan kegiatan hingga otorisasi, pembayaran, penyusunan SPJ, dan pelaporan, sehingga dapat diketahui bagian mana yang menjadi titik rawan (*risk points*).

Tahap berikutnya dilakukan asesmen risiko menggunakan Forum Group Discussion (FGD) dan checklist kepatuhan untuk menilai risiko berstatus tinggi pada aspek seperti kas, pengadaan sederhana (bila relevan), serta proses SPJ dan pelaporan. Hasil asesmen digunakan untuk perancangan kontrol (*to-be*) yang menetapkan kontrol kunci sekaligus penataan peran (misalnya melalui prinsip RACI), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan SOP dan template administrasi yang ringkas namun mudah dijalankan. Selanjutnya dilakukan pelatihan dan simulasi kasus agar perangkat kelurahan mampu menyusun SPJ

dengan benar, melakukan rekonsiliasi, dan menjalankan pengarsipan sesuai standar; implementasi kemudian didampingi dalam siklus transaksi selama 2–4 minggu dengan review mingguan. Penelitian diakhiri dengan evaluasi melalui audit sampel dokumen sebelum–sesudah menggunakan checklist, peninjauan dashboard realisasi dan register transaksi, serta wawancara staf pengelola keuangan dan pimpinan kelurahan untuk memastikan keberlanjutan SPI melalui serah terima dokumen dan tindak lanjut temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pengelolaan keuangan kelurahan memberikan perubahan positif terutama pada aspek kelengkapan pertanggungjawaban (SPJ), ketertiban pencatatan, serta ketepatan waktu pelaporan. Sebelum implementasi, praktik administrasi cenderung belum konsisten: dokumen pendukung tidak selalu lengkap, rekonsiliasi dilakukan tidak rutin, dan waktu pencarian dokumen relatif lama sehingga menyulitkan proses verifikasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kesalahan administrasi dan mengurangi kepercayaan pihak terkait karena informasi keuangan tidak tersaji secara teratur.

Setelah SPI diterapkan, terjadi peningkatan pada kelengkapan SPJ yang ditandai oleh adanya checklist yang mengikat setiap jenis belanja dan verifikasi berjenjang sesuai batas kewenangan. Rekonsiliasi menjadi agenda bulanan yang wajib, bukan kegiatan insidental, sehingga kesesuaian antara buku kas dan rekening lebih terjaga. Di sisi lain, waktu pencarian dokumen menurun karena dokumen sudah diberi penomoran yang jelas dan disimpan dengan struktur arsip fisik maupun digital per bulan dan per kegiatan.

Hasil berikutnya terlihat dari menurunnya temuan administrasi (misalnya ketidaksesuaian dokumen, kekurangan bukti pendukung, atau ketertiban pengarsipan). Temuan-temuan yang sebelumnya lebih sering muncul mulai berkurang karena proses pengajuan, verifikasi, otorisasi, pencatatan, dan penyusunan SPJ mengikuti SOP yang sama di setiap siklus transaksi. Selain itu, adanya log temuan dan tindak lanjut dari audit internal sederhana membantu pengelola keuangan memahami akar masalah administrasi serta melakukan perbaikan secara bertahap.

Dari sisi transparansi, SPI memperkuat keterbukaan informasi melalui publikasi ringkas realisasi program yang lebih mudah diakses. Dengan adanya format pelaporan dan dashboard realisasi, kelurahan dapat menyajikan ringkasan capaian kegiatan (nilai, periode, output, dan kanal pengaduan) secara lebih konsisten. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan informasi, tetapi juga memudahkan masyarakat atau pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan memantau perkembangan program secara lebih tertib.

Namun demikian, penelitian juga mencatat sejumlah kendala yang muncul selama implementasi. Kendala utama adalah keterbatasan SDM yang dapat memengaruhi efektivitas pemisahan tugas dan kecepatan proses verifikasi. Selain itu, kebiasaan dokumentasi yang sebelumnya tidak seragam menyebabkan sebagian dokumen pada awal penerapan masih perlu penyesuaian, sementara arsip dapat menumpuk jika penataan dokumen tidak dilakukan secara disiplin. Pada periode tertentu saat kegiatan meningkat, kepatuhan terhadap prosedur juga berpotensi menurun.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian menekankan strategi mitigasi yang realistis: (1) penerapan kontrol kompensasi seperti otorisasi berjenjang dan audit sampel yang lebih sering saat SDM terbatas, (2) penggunaan template satu pintu agar format dokumen seragam, (3) penomoran dokumen dan proses scan bertahap untuk mencegah penumpukan arsip, serta (4) penetapan jadwal penutupan minggu/bulan berikut tanggung jawab PIC (person in charge) agar SPJ dan rekonsiliasi tidak tertunda. Dengan pendekatan ini, SPI tetap dapat berjalan meski terdapat keterbatasan kapasitas.

Terkait keberlanjutan, hasil menunjukkan bahwa SPI yang efektif memerlukan struktur organisasi dan rutinitas monitoring. Penelitian merekomendasikan pembentukan SK Tim SPI kecil dan penetapan jadwal monitoring bulanan, integrasi checklist SPJ serta rekonsiliasi sebagai SOP wajib penutupan periode, serta review triwulan terhadap temuan untuk pembaruan template/SOP. Dengan cara ini, pengendalian tidak berhenti pada penyusunan dokumen, melainkan terus diterapkan pada praktik pengelolaan keuangan sehari-hari.

Kesimpulannya, penerapan SPI yang sederhana namun disiplin—melalui pemisahan tugas, otorisasi, checklist SPJ, rekonsiliasi, dan pengarsipan—mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan kelurahan. Keberadaan dashboard realisasi dan monitoring rutin membuat pengelola keuangan lebih siap menghadapi pemeriksaan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik. Walaupun masih terdapat kendala pada SDM dan konsistensi dokumentasi, mitigasi dan mekanisme keberlanjutan yang disusun dalam penelitian membantu memastikan SPI dapat berjalan secara terus-menerus dan memberikan dampak nyata terhadap tata kelola keuangan kelurahan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan. Melalui penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, serta pemantauan dan komunikasi yang jelas, kelurahan mampu mengurangi peluang terjadinya kesalahan pencatatan dan pengeluaran yang tidak sah. Selain itu, SPI juga mendorong keteraturan proses pengelolaan anggaran dari perencanaan hingga pelaporan sehingga kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih andal dan dapat ditelusuri.

Pada praktiknya, efektivitas SPI ditopang oleh penyusunan SOP serta template administrasi yang sederhana, pelatihan bagi aparat kelurahan, dan penerapan kontrol kunci seperti pemisahan tugas, otorisasi, kontrol dokumen, serta pengarsipan yang baik. Hasil penelitian mencatat adanya perubahan yang signifikan pada kepatuhan administrasi dan peningkatan akuntabilitas setelah implementasi, namun juga menggarisbawahi adanya kendala yang perlu terus diatasi agar sistem tetap berkelanjutan. Dengan demikian, SPI bukan hanya dokumen formal, melainkan perlu dijalankan secara konsisten melalui evaluasi rutin, pendampingan, dan pemutakhiran mekanisme kontrol sesuai kebutuhan kelurahan.

REFERENSI

- Alfiani, F., & Estiningrum, S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 134–145.
- Fiqri, A., & Sari, M. (2019). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan SPIP terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 24–33.
- Hakiki, F., & Hidayat, A. (2022). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 5(1), 45–56.
- Novatiani, K. dan V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Saputra, A., Priadi, E., & Rustamaji (2024). Analysis Of Slope Stability Due to Illegal Gold Mining In Bengkayang Regency *Jurnal Teknik Sipil*, 24 (1) 766-777
- Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Setiyanningrum, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Skripsi, 162.
- Situmorang, D., M. et al. "Analysis Of Accounting Knowledge Behavior and Accounting Recording on Revenue with Cultural Behavior Moderating Variable" *Al-Mal: Journal Of Islamic Accounting and Finance [ONLINE]* Volume 05 Number 02 (Des 31, 2024)
- Tania, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.